



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
INSPEKTORAT

LAPORAN HASIL EVALUASI ATAS
IMPLEMENTASI AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH PADA DINAS
PERHUBUNGAN TAHUN 2021



INSPEKTORAT
KABUPATEN PEMALANG
JL. PEMUDA No.44 PEMALANG

Nomor : 700/50/EVS/2021

Tanggal : 4 Agustus 2021

Jalan Pemuda Nomor 44 Pemalang 52313 Provinsi Jawa Tengah
Telp. / Fax. (0284) 321254



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG INSPEKTORAT

Pemalang, 4 Agustus 2021

Nomor : 700/50/EVS/2021
Lampiran : -
Perihal : Laporan Hasil Evaluasi atas
Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah Tahun
2020

Kepada Yth.
Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Pemalang
di -

PEMALANG

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, kami telah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang.

Adapun Tujuan evaluasi ini adalah untuk :

- a. Memperoleh informasi tentang implementasi Sistem AKIP.
- b. Menilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
- c. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas instansi.

Evaluasi dilaksanakan terhadap 5 (lima) komponen besar manajemen kinerja, yang meliputi :

- a. Perencanaan Kinerja;
- b. Pengukuran Kinerja;
- c. Pelaporan Kinerja;
- d. Evaluasi Internal, dan
- e. Capaian Kinerja.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2020 merupakan salah satu dokumen yang dievaluasi selain Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016-2021, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) / Renja Tahun 2020, dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2020, serta dokumen terkait lainnya.

Hasil evaluasi yang dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 s.d. 100, yang selanjutnya diberikan "kategori peringkat" untuk menentukan tingkat keberhasilan akuntabilitas kinerja instansi yang bersangkutan, dengan kriteria :

NO.	KATE-GORI	NILAI ANGKA	INTERPRESTASI
1.	AA	>90-100	Sangat Memuaskan
2.	A	>80-90	Memuaskan Memimpin perubahan, berbudaya kinerja, berkinerja tinggi dan sangat akuntabel
3.	BB	>70-80	Sangat Baik Akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal.
4.	B	>60-70	Baik Akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja dan perlu sedikit perbaikan
5.	CC	>50-60	Cukup Memadai, akuntabilitas kinerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggungjawaban perlu banyak perbaikan tidak mendasar
6.	C	>30-50	Kurang Sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja tapi perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar.
7.	D	0-30	Sangat Kurang Sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja, perlu banyak sekali perbaikan, sebagian perubahan yang sangat mendasar

Berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan oleh Evaluator menunjukkan bahwa Dinas Perhubungan Kabupaten Pematang Jaya memperoleh nilai atau skor sebesar **58,61** dengan kategori **CC (Cukup)** yang dapat diartikan bahwa akuntabilitas kinerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggungjawaban, perlu banyak perbaikan tidak mendasar.

Nilai sebagaimana tersebut, merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi di lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang dengan hasil sebagai berikut:

No.	Komponen	Bobot	Nilai Hasil Evaluasi
1.	Perencanaan Kinerja	30 %	22,15
2.	Pengukuran Kinerja	25 %	10,31
3.	Pelaporan Kinerja	15 %	9,96
4.	Evaluasi Internal	10 %	4,50
5.	Capaian Kinerja	20 %	11,69
Jumlah		100,00	58,61

Selain mempertimbangkan nilai kualitas penerapan (capaian) juga menilai dan melihat kondisi terakhir, praktik dan hal-hal substansif yang telah diwujudkan dan dilakukan serta konsistensi dan keberlanjutan (*sustainability*) implementasinya, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan guna perbaikan dan penyempurnaan, adapun rinciannya adalah sebagai berikut :

A. PERENCANAAN KINERJA (30%)

Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang 2016-2021 menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan program, komponen-komponen Renstra ini mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pemalang yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan taktis-strategis untuk mengimplementasikan sasaran-sasaran daerah. Renstra ini juga menjabarkan potret permasalahan daerah yang menjadi kewenangan satuan kerja yang bersangkutan, namun demikian masih terdapat kelemahan dalam hal :

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang sudah disusun, namun demikian masih terdapat beberapa kelemahan antara lain:

- Berkaitan dengan reviu Renstra, Evaluator tidak dapat memastikan bahwa dokumen Renstra telah direviu secara berkala.

Dokumen Perencanaan Kinerja Tahunan (Renja), dan Perjanjian Kinerja (PK) sudah disusun, namun demikian masih terdapat beberapa kelemahan terkait perencanaan kinerja tahunan antara lain:

- Dalam Rencana Kinerja Tahunan belum seluruhnya dimanfaatkan untuk penyusunan anggaran.

B. PENGUKURAN KINERJA (25%)

Evaluasi terhadap pengukuran kinerja secara umum dapat dilakukan dengan menilai Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai ukuran kinerja secara formal. Berdasarkan pengukuran IKU, terdapat beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian dalam rangka upaya perbaikan secara berkelanjutan, yaitu:

1. Pengumpulan data kinerja kurang dapat diandalkan. Tidak ada mekanisme pengumpulan data kinerja yang memadai atau terstruktur (jelas mekanisme pengumpulan datanya, siapa yg mengumpulkan data, mencatat, dan siapa yg mensupervisi, serta sumber data yang valid);
2. Hasil pengukuran (capaian) kinerja mulai dari setingkat eselon IV keatas belum dikaitkan dengan (dimanfaatkan sebagai dasar pemberian) *reward & punishment*;
3. Evaluator tidak dapat memastikan bahwa dokumen IKU telah direviu secara berkala.

C. PELAPORAN KINERJA (15%)

Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang telah menyusun LkjIP. Namun demikian masih terdapat kekurangan dalam hal :

1. Laporan kinerja belum menyajikan informasi pencapaian sasaran yang berorientasi *outcome*.
Konsepsi akuntabilitas menuntut setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah tidak sekedar berorientasi output, melainkan berorientasi outcome. Pada LKjIP Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang, sebagian informasi pada LKjIP hanya menyajikan capaian yang bersifat *output*, dan belum menyajikan capaian *outcome* atas kinerja yang dicapai di tahun sebelumnya.
2. LKjIP belum menyajikan informasi tentang analisis efisiensi penggunaan sumber daya
LKjIP Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang hanya menyajikan mengenai realisasi capaian keuangan / anggaran, efisiensi yang disajikan berupa efisiensi atas penyerapan anggaran. Tidak terdapat informasi mengenai upaya-upaya efisiensi yang telah dilakukan.
3. Informasi yang disajikan belum dimanfaatkan untuk penilaian kinerja (belum dijadikan dasar pemberian *reward and punishment*)

Informasi yang disajikan belum dimanfaatkan untuk perbaikan perencanaan, serta perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan organisasi. Informasi capaian kinerja dalam LKjIP seharusnya dimanfaatkan untuk perbaikan perencanaan, menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan, serta untuk peningkatan kinerja. Namun demikian, sampai dengan saat evaluasi ini dilaksanakan tidak ditemukan cukup bukti bahwa informasi capaian kinerja pada LKjIP telah dimanfaatkan sebagaimana mestinya.

D. EVALUASI INTERNAL (10%)

Evaluator tidak memperoleh cukup bukti bahwa terdapat pemantauan mengenai kemajuan pencapaian kinerja beserta hambatannya. Begitu pula dengan evaluasi atas program-program yang dilaksanakan serta evaluasi rencana aksi dalam rangka

mencapai sasaran dan tujuan organisasi, dimana diakui bahwa evaluasi dilakukan hanya saja tidak terdokumentasi dengan baik.

E. PENCAPAIAN SASARAN/ KINERJA ORGANISASI (20%)

Pemantauan mengenai kemajuan pencapaian kinerja beserta hambatannya telah dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang melalui rapat internal (*staff meeting*) terutama pada saat menjelang perubahan anggaran. Sedangkan evaluasi atas program-program yang dilaksanakan serta evaluasi rencana aksi dalam rangka mencapai sasaran dan tujuan organisasi, diakui bahwa evaluasi dilakukan hanya saja menurut evaluator belum memenuhi kriteria evaluasi program dan rencana aksi yang seharusnya. Hal tersebut didasarkan pada belum adanya bukti bahwa evaluasi atas program dan rencana aksi telah disertai dengan analisis serta simpulan tentang kondisi sebelum dan sesudah dilaksanakannya suatu program. Selain itu, belum terdapat analisis tentang perubahan target yang dituju atas program.

Berdasarkan uraian di atas serta dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan budaya kinerja, kami merekomendasikan kepada Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang untuk memperhatikan dan menindaklanjuti beberapa hal sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas perencanaan kinerja, memperbaiki kelemahan-kelemahan dalam Renstra dan Rencana Kinerja Tahunan Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang, antara lain dengan:
 - a. memanfaatkan rencana kinerja tahunan dalam penyusunan anggaran dan melakukan monitor serta memanfaatkan rencana aksi atas kinerja.
2. Meningkatkan kualitas pengukuran kinerja, antara lain dengan :
 - a. mengumpulkan data kinerja atas Rencana Aksi secara berkala dengan metode pengumpulan data kinerja yang andal dan mengembangkan penggunaan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja.
 - b. mendokumentasikan dan menyajikan dalam Laporan Kinerja terkait Pengukuran data kinerja untuk kinerja Eselon III dan IV serta memanfaatkan capaian kinerja sebagai dasar pemberian *reward* dan *punishment*.
3. Meningkatkan kualitas penyajian informasi dalam LKjIP, dengan menyajikan target yang tepat, melakukan pengukuran dan analisis yang memadai terkait realisasi dan capaian seluruh indikator kinerja - lengkap dengan data pendukung perhitungannya, menyajikan informasi *outcome* atas kinerja serta efisiensi penggunaan sumber daya. Membandingkan realisasi dan capaian data kinerja dengan standar-standar lain yang diperlukan, dan menyajikan sumber data yang andal.
4. Meningkatkan kualitas evaluasi internal dengan melakukan pemantauan pencapaian kinerja atas program/kegiatan dan Rencana Aksi, yang lebih memfokuskan kepada hasil

(*outcome*). Evaluasi ini paralel dengan reviu atas program, kegiatan, dan komponen anggaran guna memastikan bahwa anggaran dialokasikan hanya untuk mencapai sasaran strategis. Dan atas evaluasi tersebut supaya terdokumentasikan.

Demikian hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang yang dapat kami sampaikan, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Plt. INSPEKTUR KABUPATEN PEMALANG
Staf Ahli Bupati Pemalang
Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik



EKO EDI PRIHARTANTO, S.H., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19651104 199403 1 008

Tembusan : Kepada Yth.

1. Bupati Pemalang (sebagai laporan);
2. Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Pemalang;
3. Kasubbag Adum pada Inspektorat Kabupaten Pemalang.